

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 5, Nomor 2, April 2011

ISSN 1907-848X

Halaman 89 - 182

DAFTAR ISI

Editorial

**Etika Komunikasi dalam Kitab *Adab Addunya Waddin*
Karya Al-Mawardi: Sebuah Studi Hermeneutika**

Ahmad Alwajih
(89 - 100)

**Agama dan *Entertainment*:
Fungsi Sosial Media Massa dalam Program Religi di TV**

Monika Sri Yuliarti
(101 - 108)

**Hedonisme Spiritual pada Tayangan Religi:
Analisis Wacana Kritis Program Religi "*Islam Itu Indah*" di TransTV**

Puji Hariyanti
(109 - 128)

**Jurnalistik Online Indonesia:
Analisis Framing Tiga Portal Berita Online di Indonesia**

Mahfud Anshori
(129 - 144)

**Teori *Agenda Setting* dan Citra Pemerintah:
Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY**

Ansor
(145 - 156)

**Keistimewaan Yogyakarta dan Politik Wacana:
Analisis Wacana Visual Media di Ruang Publik**

Kamil Alfi Arifin
(157 - 170)

**Komodifikasi Budaya Lokal dalam Televisi:
Studi Wacana Kritis Komodifikasi *Pangkur Jenggleg* TVRI Yogyakarta**

Sumanri
(171 - 181)

Teori *Agenda Setting* dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY

*Ansor*¹

Abstract

Media play an important role in political life. In agenda setting theory, what is considered important by the media will be important as well for the audience (public). This includes how the media show the reality will influence the way public perceive it. In the corruption issue context in Indonesia, this research found that corruption is considered as an important agenda in the media. It can be seen through the placement of news in the headlines, column length, and paragraphs. Then, most of it was also delivered in an unfavorable way which influences public's perception. Thus, the image of the government continues to decline, especially in law enforcement and the handling of corruption cases.

Keywords:

Media, agenda setting theory, the government image

Pendahuluan

Dalam kehidupan politik, media memegang peran sangat penting. Sistem politik yang berlaku akan sangat ditentukan oleh aliran-aliran komunikasi, yang diperantarai media. Artikulasi dan agregasi kepentingan dalam sistem politik akan sangat ditentukan oleh cara media bekerja. Oleh karenanya, tidak heran jika fenomena kontemporer di bidang politik hampir semuanya termediasikan melalui media.

Di sisi lain, media bukanlah kekuatan netral. Ia tidak merefleksikan realitas, tapi mengkonstruksi realitas (Eriyanto, 2002). Konstruksi realitas inilah yang pada akhirnya menentukan cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Semuanya dipengaruhi oleh cara-cara media menyampaikannya kepada kita. Dalam perspektif *agenda setting*, apa yang dianggap penting oleh media akan kita anggap penting juga, dan cara realitas disampaikan akan memengaruhi kita dalam melihat realitas tersebut. Pun dalam cara pandang masyarakat Indonesia dalam melihat korupsi.

Sejak bergulirnya reformasi, korupsi menjadi agenda penting media dan masyarakat. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, ada 16 kementerian yang diduga tersandung kasus korupsi (*Kompas*, 17 September 2011). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan dalam sepuluh tahun terakhir sedikitnya 18 kementerian terkait kejahatan korupsi, yang berhubungan dengan penguasa dapat dikategorikan sebagai *political corruption* (*Suara Merdeka*, 21 September 2011).

¹ Peneliti di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta.

Korupsi sebenarnya tidak hanya menjadi persoalan Indonesia. Negara-negara lain juga mengidap penyakit yang sama. China, juga mengidap penyakit korupsi yang parah. Namun, penanganan korupsi di negara itu tampaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan penanganan korupsi di Indonesia. Di Indonesia, tersangka korupsi sering kali lolos dari jerat hukum, atau mendapatkan hukuman yang ringan. Misalnya, seseorang yang divonis bersalah karena kasus korupsi hanya mendapatkan hukuman 4-5 tahun saja. Padahal, di China, hukuman bagi koruptor bisa sampai hukuman mati.

Tak terselesaikannya kasus-kasus korupsi di Indonesia –dan bahkan sepertinya menjadi semakin buruk– membuat negara ini selalu menempati prioritas tinggi di media massa. Kasus-kasus korupsi dan pengadilan atasnya hampir selalu menjadi *headline* di media massa, baik nasional dan lokal. Hal ini berakibat pada menguatnya masalah korupsi sebagai agenda publik bersama. Pada akhirnya, kondisi ini menjadi indikator keberhasilan dan kegagalan pemerintah.

Di negara-negara demokrasi seperti Indonesia pascareformasi, keberhasilan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Salah satunya adalah korupsi. Di sisi lain, perihal masalah-masalah itu menjadi masalah publik –dan karenanya menjadi agenda publik– akan sangat ditentukan oleh pemberitaan media massa.

Saat ini media memang memegang peran yang sangat penting dan mampu menjembatani kehidupan sosial dan politik. Media, melalui pemberitaannya, dapat memengaruhi cara pandang orang dalam melihat realitas politik. Dengan kata lain, media memengaruhi opini publik yang pada akhirnya memengaruhi kinerja pemerintah (Rianto, 2010), termasuk bagaimana publik mempersepsi kinerja pemerintah. Beberapa kajian tentang *agenda setting* media menemukan bahwa berita-berita di media memengaruhi cara orang dalam melihat kandidat, dan lebih-lebih kinerja pemerintah. Sebuah pemerintahan akan dipersepsi negatif dan kinerja buruk karena media secara kontinu memberikannya demikian.

Tulisan ini ingin memperluas pandangan teoritik tersebut dalam konteks Indonesia dengan mengujinya secara spesifik dalam kasus korupsi. Berbagai pemberitaan kasus korupsi selalu ditampilkan dalam pemberitaan baik oleh harian *Kompas*, *Republika*, maupun *Koran Tempo* serta media elektronik dan media lainnya. Di sini, akan diuji apakah ada pengaruh antara pemberitaan korupsi yang masif di media massa dengan persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan korupsi.

Kajian ini ingin melihat hubungan antara pemberitaan media massa tentang korupsi dengan persepsi publik mengenai kinerja pemerintah, utamanya dalam menangani korupsi. Selain itu, dari kajian ini akan diketahui apakah *framing* dan *priming* media-dalam teori *agenda setting*-memengaruhi persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan kasus korupsi.

Opini Publik dalam Sistem Demokrasi

Pendapat umum memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan demokrasi. Tidak heran jika kelompok-kelompok politik berusaha menanamkan citra

positif melalui jajak pendapat. Di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, para pemimpin partai, calon presiden, senator dan anggota parlemen, serta kelompok-kelompok penekan mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan pendapat umum yang positif dengan berbagai cara. Misalnya mengadakan konferensi pers, wawancara dengan wartawan, memasang iklan, menulis artikel, membuat buku, memproduksi stiker, membeli spot televisi, memasang *billboard*, *displays*, baliho, atau media-media promosi lainnya untuk menarik perhatian masyarakat.

Di sisi lain, upaya merebut simpati pendapat umum tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas media komunikasi. Pada titik ini, pendapat umum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi preferensi dan dimensi intensitas. *Dimensi preferensi* adalah mengukur pilihan terhadap alternatif yang ada, sedangkan *dimensi intensitas* adalah mengukur bagaimana kuatnya pilihan itu terhadap alternatif yang ada (Cangara, 2011: 148).

Dalam asas demokrasi, pendapat umum bisa tumbuh dengan baik karena menjadi *the five branches of government* yang harus didengar. Tanpa mendengar pendapat umum, pemerintah akan kehilangan dukungan sebab kepekaan pada pendapat umum merupakan hal yang sangat esensial (Cangara, 2011:148-149).

Untuk memahami pendapat umum, Hadley Cantril, seorang pakar hubungan masyarakat dan pendapat umum Amerika Serikat dalam bukunya *Gauging Public Opinion* mengemukakan beberapa prinsip pendapat umum sebagai berikut:

1. Pendapat umum dinyatakan dalam bentuk ucapan atau sikap yang dapat diinterpretasikan.
2. Orang mudah terpengaruh dan berusaha mencari informasi dan mencoba menginterpretasikannya.
3. Apabila kepentingan seorang terkait di dalamnya, maka ia segan atau sama sekali tidak mau mengubah pendapatnya.
4. Pendapat umum memiliki arah (*direction*), yakni ada yang mendukung, ada pula yang menentang, bahkan ada yang netral.
5. Pendapat umum berusaha mencari keseimbangan (*stability*) dengan mencoba melihat seberapa lama pendapat itu bisa bertahan.
6. Isi pesan (*content of message*). Apakah pendapat itu dibuat menurut pengalaman sendiri atau diperoleh melalui media massa, teman, atau sekadar gosip. Banyak orang mempunyai penilaian terhadap sesuatu, tetapi tidak diungkapkan secara langsung.
7. Rasa, yakni sejauh mana seseorang merasakan atau terlibat dalam suatu isu. Di sini, bisa saja terjadi adanya kelompok publik tertentu merasa terlibat, sementara lainnya tidak merasakannya (Cangara, 2011: 140-141).

Agenda dan opini publik terbentuk melalui media. Dari media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa pun datang menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial politik. Di sisi lain, realitas yang ditampilkan media adalah realitas yang sudah diseleksi, realitas tangan kedua atau *second hand reality* (Rakhmat: 1991: 224).

McComb dan Shaw (Rakhmat, 1991: 229) mengatakan dampak media massa dalam kemampuannya untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu, disebut sebagai *agenda setting*. Di sinilah, terletak efek komunikasi massa yang terpenting yaitu kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita.

Teori *agenda setting* dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya/diberitakannya. Karenanya, informasi yang diperoleh pembaca, pemirsa maupun pendengar kebanyakan melalui media massa. Oleh karena itu, agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat. Agenda masyarakat diketahui dari apa yang mereka pikirkan, bicarakan, atau dianggap sebagai masalah yang menarik perhatian masyarakat (Rakhmat, 1991: 230).

Berita Media dan Agenda Setting Theory

Newcomb mengatakan dalam konteks sosiologis, perubahan sikap suatu masyarakat umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang diterima (Muhtadi, 1999: 44). Hal ini sejalan dengan fungsi media massa, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, serta memengaruhi. Melalui fungsinya yang keempat ini, pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Para peneliti sebelum McComb dan Shaw mempunyai beberapa gagasan yang sangat mirip dengan hipotesis penentuan agenda. Pernyataan yang lebih langsung tentang gagasan penentuan agenda terbit pada tahun 1958 dalam artikel yang ditulis Norton Long (1958; dalam Severin dan Tankard, 2011: 264):

Dalam beberapa hal, surat kabar adalah penggerak utama dalam menentukan agenda daerah. Surat kabar memiliki andil besar dalam menentukan apa yang akan dibahas oleh sebagian besar orang, apa pendapat sebagian besar orang tentang fakta yang ada, dan apa yang dianggap sebagian besar orang sebagai cara untuk menangani masalah.

Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (1959; Severin dan Tankard, 2011: 264) juga menghasilkan pernyataan awal tentang gagasan penentuan agenda:

Media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. Media massa membangun citra public tentang figur-figur politik. Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat.

Pernyataan lain tentang gagasan penentuan agenda yang diulangi yang hampir dalam setiap buku atau artikel mengenai topik tersebut adalah pernyataan Bernard Cohen (1963; Severin dan Tankard, 2011: 264) tentang kekuatan pers.

Surat kabar mungkin tidak sering berhasil memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi surat kabar luarbiasa berhasil dalam memberitahu pembacanya apa yang harus dipertimbangkan.

Media massa menempatkan isu-isu menonjol melalui penempatan berita dalam suatu halaman tertentu, ukuran *headline*, dan ruang yang diberikan untuk berita tersebut. Adapun radio atau televisi biasanya menempatkan berita-berita penting di bagian awal sebagai sebuah *headline* dengan durasi siaran bervariasi tergantung pada nilai pentingnya. Banyaknya liputan mengenai suatu isu memberikan isyarat mengenai isu-isu yang menonjol.

Wanta dan Ghanem (Rianto, 2010: 34) mengemukakan, hal ini mendorong khalayak untuk belajar mengenai isu-isu yang dianggap penting. Menurut teori *agenda setting*, khalayak belajar banyak dari media melalui berita. Mereka belajar tidak hanya mengenai detil faktual mengenai isu-isu publik, peristiwa, kepribadian seseorang, tetapi juga mendapatkan perspektif mengenai apa yang secara relatif penting dan berbagai macam elemen berita setiap harinya (Weaver, et.al., 1981, dalam Rianto, 2010: 34).

Dengan membaca, mendengarkan, ataupun melihat berita-berita di surat kabar, radio, atau televisi, kita menyaksikan banyak peristiwa di dunia tanpa harus bersinggungan langsung dengan peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, media melakukan proses seleksi, menentukan isu-isu pokok dan bagaimana isu-isu tersebut dipandang. Inilah yang disebut sebagai *agenda setting*.

Melalui proses seleksi dan presentasi berita, media massa memengaruhi persepsi kita mengenai topik-topik apa yang penting hari itu. Menurut Weaver (Rianto, 2010: 34), pengaruh ini memberi peranan besar dalam menentukan agenda *public* melalui pikiran dan diskusi. Persoalan-persoalan sosial politik yang kita diskusikan hari ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh liputan media mengenai hal tersebut. Seperti kasus Nazaruddin misalnya, menjadi perhatian publik karena media meliputnya setiap hari.

Beberapa peneliti telah berusaha melakukan studi tentang hubungan berita media dan ketertarikan atas isu-isu. G. Ray Funkhouser (1973; Severin & Tankard, 2011: 266), misalnya, tertarik dengan hubungan antara liputan berita dengan persepsi publik tentang pentingnya isu-isu. Untuk mendapatkan tingkat opini publik tentang isu-isu mana yang penting, Funkhouser menggunakan jajak pendapat Gallup di mana orang diberi pertanyaan tentang "masalah paling penting yang dihadapi Amerika". Untuk mengetahui tingkat isi media dengan menghitung jumlah artikel pada setiap eksemplar yang terbit dalam majalah.

Tingkat pentingnya sebuah isu dalam realitas didasarkan pada statistik dan sumber-sumber lain. Kajian Funkhouser (1973) menunjukkan bahwa media berita tidak memberikan gambaran yang sangat akurat mengenai apa yang sedang terjadi pada negara selama tahun 1960-an. Funkhouser menyimpulkan, "Media berita diyakini oleh banyak orang (termasuk pembuat keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, tetapi data di sini menunjukkan bahwa media berita tidak mesti demikian".

Iyengar, Peters, dan Kinders (1982, seperti dikutip Severin dan Tankard, 2011: 271) menemukan cara khusus bagaimana tayangan berita televisi mungkin mempunyai dampak pada pemilihan presiden. Dengan menentukan agenda untuk kampanye pemilihan, media juga menentukan kriteria yang digunakan untuk

mengevaluasi calon-calon presiden. Iyengar dkk menyebut proses ini sebagai *priming*. *Priming* adalah proses ketika media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian mengubah standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi para calon pemilihan.

Dengan konsep *priming*, korelasi antara penilaian keseluruhan dan penilaian dalam bidang masalah spesifik adalah lebih besar bagi responden yang melihat liputan yang menekankan bidang masalah itu. Ini dibandingkan dengan korelasi antara penilaian keseluruhan dan penilaian dalam bidang masalah spesifik untuk responden yang melihat liputan yang mengabaikan bidang masalah tersebut. Zucker (1978; seperti dikutip Severin dan Tankard, 2011: 272) menyatakan bahwa dampak penentuan agenda semestinya tampak bagi pengguna dan bukan pengguna media berita. Apabila penentuan agenda sebagian besar terjadi pada isu-isu yang tidak menonjol, maka cara orang mengetahui isu tersebut hanya melalui media atau berbicara dengan orang lain yang telah terekspos oleh media.

Mengulik Opini Publik dengan *Content Analysis*

Pada tahap awal, kajian tentang berita politik (korupsi) dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi terhadap dua buah koran nasional, yakni *Kompas* dan *Koran Tempo*. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis (Rahayu, 2006: 33).

Kedua koran ini diambil sebagai sampel karena dianggap mencerminkan pemberitaan koran nasional. Analisis isi dilakukan selama satu bulan dari tanggal 15 September 2011 hingga tanggal 15 Oktober 2011. Pilihan periode itu dilakukan karena kasus Nazaruddin mendapatkan perhatian yang relatif serius pada periode itu.

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh pemberitaan media, data berita koran kemudian dibandingkan dengan data-data hasil survei mengenai kinerja pemerintahan SBY dalam periode sebelum, selama, atau sesudah itu. Hasil-hasil survei didapatkan dari survei *Kompas*, *Koran Tempo*, ataupun hasil-hasil survei lembaga lain (Lembaga Survei Indonesia dan sejenisnya) yang dipublikasikan di kedua koran atau secara online.

Representasi Berita Politik di Media Massa

Selama satu bulan pemberitaan, total ada kurang lebih 31 item berita untuk *Koran Tempo* dan 32 item berita untuk *Kompas*. Ini berarti bahwa setidaknya ada satu berita korupsi dalam setiap edisinya. Dari sini, sebenarnya, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi menempati prioritas utama dalam pemberitaan kedua harian. Dibandingkan dengan tema berita-berita lain, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1, muatan berita korupsi juga cukup tinggi. Untuk *Koran Tempo*, muatan berita korupsi menempati 64% berita di halaman pertama, sedangkan harian *Kompas* sebesar 59,40%.

Periode dilakukannya kajian ini adalah ketika kasus Nazaruddin sedang mencuat sehingga tidak mengherankan jika berita-berita mengenai korupsi menempati persentase yang jauh lebih besar dibandingkan berita lain.

Tabel 1.
Muatan Berita

Muatan Berita	Koran Tempo	Kompas
Korupsi	64,5	59,4
Nonkorupsi	35,5	40,6

Pada kenyataannya, berita mengenai korupsi tidak hanya menempati persentase terbesar dibandingkan dengan tema-tema berita lain, tapi juga posisinya sebagai *headline* berita cukup tinggi. Dari keseluruhan berita tentang korupsi, *Koran Tempo* ternyata menempatkannya sebagai *headline* dalam keseluruhan beritanya di halaman pertama, sedangkan *Kompas* sebanyak 42,10%. Meski demikian, mengingat banyak tema berita yang diangkat, persentase sebesar 42,10% sebenarnya cukup besar. Ini menunjukkan bahwa korupsi ditempatkan sebagai berita yang sangat penting bagi kedua harian nasional ini.

Tabel 2.
Jenis Berita

Jenis Berita	Koran Tempo	Kompas
<i>Headline</i>	100	42,1
<i>Nonheadline</i>	0	57,9

Kesimpulan di atas yang menempatkan korupsi sebagai agenda media yang cukup penting diperkuat oleh kenyataan bahwa berita-berita tersebut disampaikan dalam jalinan narasi berita yang panjang. Setidaknya, jika dilihat dari jumlah kolom dan paragraf untuk masing-masing berita, maka berita-berita di harian *Koran Tempo* dan *Kompas* relatif cukup panjang.

Untuk *Koran Tempo*, persentase berita korupsi menempati kolom terbanyak, yakni 6-7 kolom. Jauh di atas berita-berita korupsi yang hanya dibahas antara 2-3 kolom. Sementara untuk *Kompas*, meskipun persentase berita yang menempati 2-3 kolom paling banyak, tapi jika dijumlah antara berita yang menempati 4-5 kolom dan 6-7 kolom menempati persentase mayoritas.

Berdasarkan data tersebut, tidak disangsikan lagi bahwa kedua koran nasional ini menempatkan isu korupsi sebagai agenda nasional yang penting sehingga tidak hanya selalu ada di halaman pertama, tapi sekaligus menempati *headline* dengan jumlah kolom dan paragraf yang relatif cukup banyak. Artinya, kasus korupsi cukup penting dan layak dibahas secara panjang lebar.

Tabel 3.
Jumlah Kolom Pemberitaan Korupsi

Jumlah kolom	Koran Tempo	Kompas
2-3 kolom	5	42,1
4-5 kolom	15	36,8
6-7 kolom	80	21,1

Tabel 4.
Jumlah Paragraf Berita Korupsi

Jumlah Paragraf	<i>Koran Tempo</i>	<i>Kompas</i>
5 - 10 paragraf	60	36,8
11 - 15 paragraf	30	21,1
lebih dari 15 paragraf	10	42,1

Persoalannya kemudian, bagaimana kecenderungan pemberitaan kedua harian ini dalam memberitakan isu-isu korupsi? Mengidentifikasi kecenderungan semacam ini penting, karena cara menyampaikan berita mengenai suatu hal akan memengaruhi bagaimana orang-orang mempersepsi hal tersebut. Dengan kata lain, *favourable* atau tidaknya suatu pemberitaan terhadap korupsi akan berpengaruh terhadap bagaimana khalayak mempersepsi hal itu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap citra dan kredibilitas pemerintahan yang sedang berkuasa.

Koran Tempo dan *Kompas*, sebagian besar beritanya relatif cukup netral meskipun yang masuk ke dalam kategori *favourable* hanya sebesar 10% untuk *Koran Tempo* dan 10,50% (lihat tabel 5) di harian *Kompas*. Ini menunjukkan bahwa dalam hal penanganan korupsi, pemerintah dianggap kurang. Sebab, meskipun persentase berita netral menempati persentase tertinggi, tapi berita-berita yang disampaikan dengan cara yang kurang bagus (*unfavourable*) ternyata jauh di atas berita yang *favourable*. Dengan begitu, tidak mengherankan jika hasil-hasil survei dan jajak pendapat mengenai kinerja berita dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sangatlah buruk.

Tabel 5.
Kecenderungan Pemberitaan Korupsi

Kecenderungan Pemberitaan	<i>Koran Tempo</i>	<i>Kompas</i>
<i>Favourable</i>	10	10,5
<i>Netral</i>	45	52,6
<i>Unfavourable</i>	45	36,8

Dalam teori *agenda setting*, bukan saja apa yang dianggap penting media akan dianggap penting oleh khalayak, tapi cara memberitakan suatu isu juga memengaruhi persepsi khalayak mengenai isu tersebut. Dalam kajian ini, cara *Koran Tempo* dan *Kompas* memberitakan isu korupsi dilihat berdasarkan *favourable*, netral, dan *unfavourable* pemberitaan tersebut. Jika *favourable*, maka dianggap bahwa berita mengenai korupsi positif, sedangkan jika *unfavourable* maka pemberitaan kedua harian tersebut dianggap sebagai kritis dan bernada negatif terhadap kasus korupsi di Indonesia. Netral bahwa berita berada di tengah-tengah, tidak memberikan kecenderungan penilaian.

Untuk melihat dampak pemberitaan semacam itu, uraian berikut akan memaparkan hasil-hasil poling dan survei yang dilakukan oleh berbagai pihak yang dipublikasikan baik melalui koran tersebut maupun melalui media lain, termasuk media online. Poling atau survei yang dipilih adalah masa selama dan sesudah analisis isi berita dilakukan. Hal ini penting agar dampak-dampak pemberitaan dalam pengertian *agenda setting* bisa diketahui.

Dari keseluruhan hasil survei ataupun poling, ternyata konsisten dengan pemberitaan di kedua koran baik *Koran Tempo* maupun *Kompas*. Dengan kata lain, hasil poling menunjukkan bahwa citra pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi terus mengalami penurunan. Poling ataupun survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ataupun Lingkaran Survei Indonesia (LSI) meneguhkan kecenderungan ini.

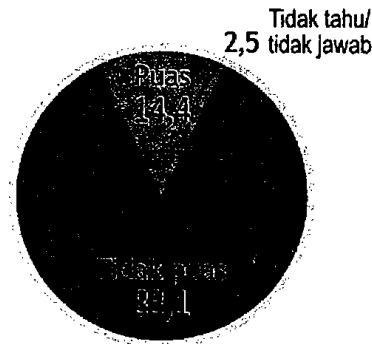
Pada tanggal 12 September 2011, *Kompas* mempublikasikan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh divisi Litbang dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga hukum dan pemerintahan dalam menangani kasus korupsi. Laporan itu juga membuat perbandingan dari tahun ke tahun menyangkut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jajak pendapat yang dilakukan terhadap 928 responden ini menemukan bahwa sebagian besar responden tidak puas terhadap kinerja lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Sebanyak 82,3% yang menyatakan tidak puas, dan hanya sebesar 14,3% yang menyatakan puas, dan sisanya sebesar 3,4% tidak tahu. Sementara itu, untuk tingkat kepuasan terhadap KPK, sebanyak 75,5% menyatakan tidak puas, dan sebanyak 20,6% menyatakan puas. Sisanya, sebanyak 3,9% menyatakan tidak tahu. Dibandingkan lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), KPK ternyata masih dianggap lebih baik.

Meskipun demikian, temuan ini tampak sedikit tidak konsisten dengan pertanyaan berikut yang diajukan *Kompas*, yakni apakah lembaga-lembaga berikut mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dari hasil jajak pendapat, ditemukan bahwa sebanyak 56,7% menyatakan tidak mampu, dan sebanyak 39,4% menyatakan mampu. Selebihnya, sebanyak 3,9% menyatakan tidak tahu apakah lembaga penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim) menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Untuk KPK, persentase relatif lebih baik sama seperti sebelumnya. Dalam hal ini, sebanyak 44,4% menyatakan bahwa KPK mampu menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, dan sebesar 51,9% menyatakan tidak mampu. Selebihnya, sebanyak 3,7% menyatakan tidak tahu.

Laporan itu juga mengungkapkan *trend* kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY dalam memberantas korupsi. Perbandingan dimulai Januari 2005 dimana tingkat kepuasan mencapai 46,9% dan mencapai puncaknya pada April 2009 sebesar 74,5%. Namun, terus mengalami penurunan hingga April 2011 yang mencapai 14,8%. Pada Oktober, *trend*-nya terus mengalami penurunan. Penurunan tingkat kepuasan ini tidak bisa dilepaskan dari banyak skandal-skandal korupsi besar yang mendapatkan perhatian dan liputan terus-menerus media massa sehingga persepsi publik semakin buruk.

Jajak pendapat berikutnya dilakukan pada Oktober 2011. Pada laporan *Kompas* tanggal 10 Oktober 2011, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja

pemerintah dalam penanganan korupsi semakin besar. Jajak pendapat dilakukan tanggal 5-7 Oktober 2011, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap 875 responden. Hasilnya, sebanyak 83,1% menyatakan tidak puas terhadap penyelenggaraan negara, dan hanya sebesar 14,4% yang menyatakan puas.



Grafik 1.
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber: Jajak Pendapat Kompas, "Tersandera Sikap Politikus-Birokrat,"
Senin, 10 Oktober 2011

Berikutnya, khusus menyangkut kinerja lembaga penegak hukum, sebanyak 82,9% menyatakan tidak puas, dan hanya 15,8% yang menyatakan puas. Selebihnya, sebanyak 1,3% yang menyatakan tidak tahu. Untuk KPK, persentasenya lebih baik meskipun tetap jauh dari memuaskan. Sebanyak 73,5%, menurut laporan *Kompas*, menyatakan tidak puas, hanya sebanyak 25,7% yang menyatakan puas, dan sisanya 0,8% menyatakan tidak tahu.

Jika hasil-hasil jajak pendapat Kompas menemukan kecenderungan negatif bagi kinerja lembaga hukum dan citra pemerintah, hasil survei LSI yang dipublikasikan *Tribunnews.com* ternyata menemukan hasil yang tidak jauh berbeda. Survei yang dilakukan terhadap 1200 responden di 33 provinsi itu memang tidak secara khusus menyoroti korupsi, tapi kinerja pemerintah.

Dalam laporannya, peneliti LSI mengemukakan bahwa pada Januari 2010, Demokrat pernah menikmati dukungan publik sebanyak 32,6 persen. Namun sekarang, dukungan itu tinggal 16,5 persen saja, drop dalam kurun waktu dua tahun. Hal ini didasari atas berbagai tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada para petinggi Demokrat dalam kasus Nazaruddin.

Penutup

Kajian ini ingin melihat bagaimana teori *agenda setting* bekerja dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, utamanya berkenaan dengan kasus korupsi. Hasil-hasil jajak pendapat menegaskan bahwa terdapat korelasi signifikan antara berita-berita di surat kabar dengan bagaimana masyarakat memberikan persepsi atas kasus-kasus korupsi dan pemerintah.

Meski suatu analisis isi yang lebih besar perlu dilakukan untuk membuktikan hal itu, tapi sampel kajian ini setidaknya mendukung hipotesis bahwa cara media menyampaikan realitas berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsi realitas tersebut. Temuan ini meneguhkan teori *agenda setting*, dan karenanya masih sangat relevan digunakan untuk menganalisis fenomena media dan politik Indonesia kontemporer.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Edisi Revisi 2011). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Jurnal ISKI, 1999. *Menuju Paradigma Baru kajian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik, Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rahayu (ed.). 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP-Dewan Pers.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rianto, Puji. 2010. "Opini Publik, Agenda setting dan Kebijakan Publik", *Jurnal Komunikasi UII*, Oktober 2010.
- Severin, Werner J. & James W Tankard, Jr. 2011. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jajak Pendapat "Kompas", "Titik Kulminasi Korupsi", *Kompas*, 12 September 2011.
- Jajak Pendapat "Kompas", "Tersandera Sikap Politikus-Birokrat," *Kompas*, 10 Oktober 2011.
- Suara Merdeka*, 21 September 2011.
- Kompas*, 17 September 2011.
- <http://id.berita.yahoo.com/dukungan-ke-partai-demokrat-ikut-merosot-075718638.html>.

